

## **BAB 1** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teori terjadinya suatu negara mengatakan bahwa suatu negara tidak terjadi begitu saja, terdapat suatu proses sebagai pemenuhan unsur - unsur pembentukan negara. Unsur - unsur itu meliputi penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Penduduk, wilayah dan pemerintahan merupakan unsur primer yang harus dipenuhi sebagai bentuk eksistensi sebuah entitas<sup>1</sup> yang dinamai sebagai negara. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur tambahan yang menguatkan entitas yang dinamai sebagai negara dalam masyarakat dunia internasional.<sup>2</sup>

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak deklarasi ikatan emosional dari suatu bangsa yang dijajah. Suku yang berbeda dengan wilayah jajahan Belanda yang dinamakan Hindia Belanda meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Ambon, Nusa Tenggara, dan Papua yang menginginkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Dukungan dari rakyat dalam negeri tidaklah cukup untuk mewujudkan suatu negara merdeka, maka dari itu dibutuhkan pengakuan dari negara lain.

---

<sup>1</sup> Entitas yaitu satuan wujud. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hlm. 304.

<sup>2</sup> Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegrave dan Suplemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 31 - 32.

Sebagai sekutu negara Belanda dalam Perang Dunia II maka Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara besar utama di dunia masih menilai Indonesia sebagai jajahan Belanda. Hal ini sangat memberatkan Indonesia untuk dapat memenuhi unsur pembentukan negara dimana salah satu unsurnya berupa pengakuan dari negara lain. Sebagai kunci mendapatkan pengakuan adalah dengan diakuinya Indonesia oleh Belanda sehingga secara otomatis negara lain atau dunia internasional pasti akan mengikutinya.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Negara dengan pemerintahan yang sah dengan lembaga - lembaga yang ada dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tujuan nasional. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaannya diperlukan pengakuan dunia internasional yang merupakan unsur pembentukan sebuah negara.

Perjuangan Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional sudah dimulai dengan pelaksanaan dalam berbagai kabinet dengan corak pemerintahan yang berbeda. Kabinet pertama yaitu kabinet presidensial<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar - dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 38.

<sup>4</sup> Kabinet presidensil yaitu corak sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Tetapi dalam Republik Indonesia pada saat kabinet presidensil pertama tahun 1945 memiliki corak tersendiri, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih oleh KNIP yaitu badan legislatif sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk. Mr. Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945 - 1958*. Bandung: Penerbit Universitas, 1958, hlm. 22 - 30.

yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno, dilanjutkan Kabinet Syahrir yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir dan Kabinet Amir Syarifuddin dengan corak parlementer<sup>5</sup>, dan terakhir Kabinet Hatta I menggunakan sistem presidensil. Tetapi perlu diingat bahwa setiap kabinet mempunyai dinamikanya dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Untuk memperjelas bagaimana bentuk perjuangan pada setiap kabinet pemerintahan Republik Indonesia sebelum Kabinet Hatta I akan diuraikan sebagai berikut.

Pembentukan kabinet presidensial pertama pada 2 September 1945 sampai 14 November 1945 menjadi ajang pemberitaan Belanda di dunia internasional dengan mengatakan bahwa orang - orang yang duduk dalam pemerintahan Republik Indonesia merupakan bekas kaki tangan Jepang. Untuk menghadapi isu tersebut maka keluarlah Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tertanggal 16 Oktober 1945 yang isinya memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)<sup>6</sup> dalam membantu presiden.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kabinet parlementer dimana presiden dan seorang perdana menteri berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Tetapi dalam Republik Indonesia pada masa revolusi yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1950 corak sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri khas tertentu. Kedudukan presiden dan wakil presiden tidak hanya sebagai simbol tetapi sewaktu - waktu dapat mengambil alih kabinet pada saat keadaan kritis. *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>6</sup> Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Tugas KNIP hanya sebagai pembantu presiden dan bekerja di bawah perintah presiden. Keluarnya Maklumat Nomor X Tahun 1945 tertanggal 16 Oktober 1945 merubah sistem kinerja dan tanggungjawab KNIP yang semula dibawah presiden berubah menjadi kekuasaan terpisah yaitu kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara sebelum dibentuk MPR dan DPR, Pekerjaan KNIP sehari - hari dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BPKNIP). *Ibid*, hlm. 26.

Pada tanggal 3 November 1945 keluar maklumat pemerintah tentang pembentukan partai - partai di Indonesia. Tindakan pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan maklumat tanggal 3 November 1945 dapat dijadikan suatu jawaban atau strategi dalam menghadapi usaha propaganda Belanda untuk menjauhkan Indonesia dalam mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Karena perubahan sistem pemerintahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer maka kabinet pertama ini didemisioner.<sup>8</sup>

Masa Kabinet Syahrir I yang terbentuk tanggal 14 November 1945 menghadapi kondisi dalam negeri dengan munculnya pertentangan antara Tan Malaka sebagai pemimpin Persatuan Perjuangan (PP)<sup>9</sup> dengan Sutan Syahrir dan ancaman dari luar dengan datangnya tentara sekutu yang diboncengi *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA)<sup>10</sup> menjadi batu penghalang besar, sehingga

---

<sup>7</sup> Bikit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 19 - 20.

<sup>8</sup> Demisioner yaitu keadaan tanpa kekuasaan. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 249.

<sup>9</sup> Persatuan Perjuangan adalah suatu *front* yang digunakan Tan Malaka untuk melawan Belanda. Pertemuan pertama tanggal 3 sampai 5 Januari 1946 berhasil menghimpun 138 organisasi masa, politik, laskar dan pimpinan Tentara Republik Indonesia (TRI). Pertemuan kedua di Solo tanggal 15 sampai 16 Januari 1946 berhasil menghimpun 141 organisasi. Akhirnya tersusun program yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh atas Indonesia sebagai tindakan terhadap lambannya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Soe Hok Gie, *Orang - orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997, hlm. 100 - 101.

<sup>10</sup> *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) adalah Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Masuknya pasukan Sekutu yang bertugas mengontrol daerah Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia II tanggal 14 Agustus 1945 ternyata dengan membawa orang - orang NICA yang hendak menegakkan kembali Hindia Belanda, NICA

tanggal 12 Maret 1946 kabinet ini didemisioner. Tidak berbeda dengan keadaan sebelumnya, Kabinet Syahrir II masih dirongrong pihak oposisi yang sama. Tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir diculik kelompok Persatuan Perjuangan, sehingga kekuasaan pemerintah diambil alih oleh Presiden Sukarno dan menandakan kabinet ini didemisioner. Yang ketiga kalinya Syahrir dipercaya memimpin kabinet tanggal 2 Oktober 1946.

Perundingan permulaan sebagai akibat dari provokasi NICA dilaksanakan tanggal 7 Oktober 1946 yang dipimpin oleh Lord Killearn wakil dari Inggris. Persetujuan gencatan senjata dimulai sejak tanggal 9 Oktober 1946 dan dihasilkan panitia gencatan senjata pada tanggal 21 Oktober 1946.<sup>11</sup> Tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani Perjanjian Linggarjati dengan hasil pengakuan secara *de facto*<sup>12</sup> Republik Indonesia atas Jawa, Sumatra, dan Madura oleh Belanda, hal ini mendapat perhatian dari dunia internasional.<sup>13</sup> Tetapi keadaan dalam negeri menjadi kacau dengan pertentangan berbagai golongan mengenai hasil Perjanjian Linggarjati, sehingga Kabinet Syahrir III jatuh dan diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin tanggal 3 Juli 1947.

Belanda selanjutnya melancarkan Aksi Militer Belanda I tanggal 17 Juli 1947 yang mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Untuk mencari

---

mempersenjatai diri dan melakukan provokasi bersenjata. Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 122.

<sup>11</sup> Bibit Suprapto, *op.cit.*, hlm. 34 - 54.

<sup>12</sup> *De facto* dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti pada kenyataannya atau pada praktiknya. Wikipedia, *De facto*, <http://id.wikipedia.org/wiki>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2012.

<sup>13</sup> Marwati Djoened Pusponegoro, Nugroho, *op.cit.*, hlm. 623.

dukungan negara lain, maka Republik Indonesia mengirim Sutan Syahrir ke India tanggal 22 Juli 1947, dengan harapan bahwa India dapat membantu posisi Republik Indonesia untuk membicarakan masalah ini pada sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). India melakukan protes ke PBB disusul Australia dan akhirnya pada 1 Agustus 1947 permasalahan Republik Indonesia dan Belanda dibicarakan dalam sidang PBB. Sikap dan campur tangan badan internasional seperti PBB merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Republik Indonesia dalam hubungan dunia internasional. Hal ini merupakan suatu tanda bahwa PBB sudah mengakui keberadaan Republik Indonesia.

PBB mulai membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk meredakan perselisihan Republik Indonesia dengan Belanda. Tanggal 8 Desember 1947 diadakan Perundingan Renville, hasil perundingan mempunyai dampak yang lebih buruk daripada Perjanjian Linggarjati. Kekalahan Mr. Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri dalam berdiplomasi menyebabkan timbulnya keretakan dalam tubuh kabinet. Masyumi menuntut bubaranya kabinet dan menarik menteri - menterinya dari kabinet. PNI bersikap masa bodoh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kekalahan Mr. Amir Syarifuddin walaupun belum menarik menterinya dari kabinet. Kabinet Amir Syarifuddin telah kehilangan pendukungnya, sehingga pada tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir Syarifuddin jatuh.<sup>14</sup>

Melihat kondisi yang dihadapi kabinet sebelumnya maka perlu pemimpin kabinet yang mampu menyatukan berbagai kalangan, tidak mudah diatur oleh

---

<sup>14</sup> Babit Suprapto, *op.cit.*, 1985, hlm. 73 - 77.

Belanda dan berwibawa. Presiden Sukarno membujuk Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai formatur dalam membentuk sebuah kabinet baru. Pekerjaan Drs. Mohammad Hatta selesai pada 29 Januari 1948 dan terbentuklah kabinet baru yaitu Kabinet Hatta I<sup>15</sup> dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Kabinet Hatta I bekerja pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Pada delapan bulan terakhir Kabinet Hatta I dalam keadaan darurat dikarenakan Agresi Militer Belanda II dan pada 22 Desember 1948 Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta, dan beberapa menteri ditawan Belanda.<sup>16</sup> Kepemimpinan dilimpahkan kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mengungsi ke Sumatera.<sup>17</sup> Bukan berarti pelimpahan kepemimpinan ini merupakan pergantian kabinet karena pada 13 Juli 1949 Mr. Syafruddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandatnya kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Pada masa Kabinet Hatta I tidak lepas dari ancaman dalam negeri dan luar negeri untuk menggoyah pengakuan Republik Indonesia. Konflik antara berbagai golongan mengenai ketidakpuasan program yang dijalankan oleh kabinet, rongrongan PKI di Madiun pada 18 September 1948, usaha Belanda untuk

---

<sup>15</sup> Nama Kabinet Hatta sesuai dengan nama perdana menterinya. Kabinet Hatta menjabat sebanyak tiga kali, yaitu Kabinet Hatta I pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta II pada 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949 dan Kabinet Hatta III atau Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. *Ibid.*, hlm. 78 - 103.

<sup>16</sup> Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta: Tintamas, 1979, hlm, 543.

<sup>17</sup> Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, Jakarta: Grafiti, 1997, hlm. 3.

memecah belah dengan mendirikan Negara Boneka, Agresi Militer Belanda II dan tantangan politik dunia internasional mengenai posisi Republik Indonesia di antara dua kekuasaan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berbagai kondisi diatas merupakan suatu tantangan yang memerlukan strategi tertentu dalam menyelesaiannya.

Berhasilnya penumpasan PKI di Madiun 1948 memberikan kepercayaan Amerika Serikat bahwa Republik Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan dalam negeri sendiri dan nonkomunis. Kondisi politik dunia diantara dua kekuatan besar dengan ideologi demokrasi kapitalis yang dianut Amerika Serikat dan komunis yang dianut Uni Soviet menjadi ajang mencari pengaruh pada Republik Indonesia sehingga bantuan dari kedua negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan Republik Indonesia tanpa mengikuti ideologi mana yang dianut. Agresi militer Belanda II memberikan perhatian dunia internasional terhadap kondisi Republik Indonesia.

Periode ini menjadi menarik, bahwa keadaan dalam negeri dan dunia internasional mendukung kekuatan Republik Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh William D. Coplin, dalam hubungan antar negara mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri. Determinan ini dapat dipakai untuk memahami politik luar negeri. Keempat determinan ini yaitu: konteks internasional, kondisi dalam negeri, pengambil kebijakan, dan ekonomi militer.<sup>18</sup> Konteks internasional berarti kondisi dan situasi

---

<sup>18</sup> Ganewati Wuryandari, Dharurodin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti, Athiqah Nur Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 17 - 18.

dunia saat itu, kondisi dalam negeri meliputi pengambil kebijakan yang berarti Kabinet Hatta I, dan ekonomi militer. Jadi dapat disimpulkan bahwa konteks internasional dan kondisi dalam negeri menjadi acuan dalam melakukan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri pada masa Kabinet Hatta adalah mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Tentu banyak orang yang menganggap bahwa tercapainya pengakuan Republik Indonesia dari Belanda yaitu pada 27 Desember 1949 tetapi yang lebih penting adalah bukan hasilnya tetapi proses terberat yang dihadapi untuk mencapai hasil itu. Masa revolusi diatas perjuangan bersenjata dan diplomasi menjadi menarik apabila tidak sekedar mengkolaborasikan keduanya, tetapi dalam tulisan ini mencoba untuk membuka strategi pemerintah untuk mendapatkan pengakuan Republik Indonesia di dunia internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Kabinet Hatta I?
2. Bagaimana Kabinet Hatta I menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional?
3. Bagaimana strategi Kabinet Hatta I dalam menjalankan pemerintahan untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pembentukan Kabinet Hatta I.
2. Menganalisis tindakan Kabinet Hatta I menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional.
3. Menganalisis strategi Kabinet Hatta I dalam menjalankan pemerintahan untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.

### **D. Manfaat Penulisan**

1. Bagi Pembaca
  - a. Menambah pengetahuan tentang perkembangan politik pemerintahan di Indonesia, khususnya Kabinet Hatta I.
  - b. Memperkaya informasi dan pengetahuan tentang sejarah pemerintahan dan strategi Kabinet Hatta I menjalankan pemerintahan dalam mendapatkan pengakuan dunia internasional.
2. Bagi Penulis
  - a. Penulis menggunakan ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan.
  - b. Penelitian ini dapat mengukur kemampuan penulis dalam meneliti, menganalisis dan merekonstruksi suatu peristiwa sejarah serta menyajikannya sebagai karya ilmiah dan objektif.
  - c. Menambah pengetahuan mengenai sejarah pemerintahan dan strategi Kabinet Hatta I menjalankan pemerintahan dalam mendapatkan pengakuan dunia internasional.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian<sup>19</sup>. Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Sesuai dengan definisi tersebut, penulis menyertakan beberapa pustaka yang akan ditelaah sebagai landasan pemikiran dalam melakukan penelitian.

Pembahasan yang pertama adalah pembentukan Kabinet Hatta I. Pembahasan ini tidak lepas dari kondisi politik dalam negeri dan luar negeri yang menimpa kabinet sebelumnya, yaitu: Kabinet Syahrir dan Kabinet Amir Syarifuddin. Menurut Herbert Feith dalam bukunya Ganewati Wuryandari, Dharurodin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti, dan Athiqah Nur Alami dalam “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik” yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar tahun 2008, menyatakan bahwa jatuh bangunnya kabinet ketika itu karena pemimpin sentral Republik Indonesia terpecah mengenai berbagai aspek dari pandangan dan persepsi mengenai Republik Indonesia dan dunia. Dalam bidang politik luar negeri, persaingan antar elit terjadi di seputar dua pertanyaan, yaitu; pertama, bagaimana menghadapi Belanda; dan kedua, persoalan perumusan identitas internasional Indonesia.<sup>20</sup> Dalam bukunya G. Moedjanto, “Indonesia Abad Ke-20 Jilid II Dari Perang Kemerdekaan Pertama

---

<sup>19</sup> Daliman, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 3.

<sup>20</sup> Ganewati Wuryandari, Dharurodin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti, Athiqah Nur Alami, *op.cit.*, hlm. 67 - 68.

sampai Pelita III” mengatakan bahwa perundingan demi perundingan mengalami kegagalan dalam Kabinet Syahrir dan Kabinet Amir Syarifuddin, dari mulai Linggarjati dan Renville. Kedua perjanjian itu mengakibatkan munculnya keretakan dalam kabinet dengan munculnya oposisi dan pihak koalisi yang tidak mau bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dalam perundingan.<sup>21</sup>

Terjadinya keretakan - keretakan yang diakibatkan oleh strategi Kabinet Syahrir dan Kabinet Amir Syarifuddin dalam menyelesaikan setiap perundingan menimbulkan ketidakpuasan berbagai golongan. Dampak yang lebih buruk berakibat pada jatuh bangunnya kabinet. Pembentukan suatu kabinet presidensial dengan dukungan nasional merupakan satu - satunya jalan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam waktu singkat.

Pembahasan yang kedua mengenai strategi Kabinet Hatta I menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional. Strategi dalam pembahasan ini berarti kebijakan yang diambil dalam menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional. Dalam bentuk nyata strategi ini tercantum dalam program kerja pada awal Kabinet Hatta I terbentuk, tetapi dalam perjalannya bisa saja berupa kebijakan yang diambil Kabinet Hatta I melihat kondisi dan situasi pada waktu itu. Adalah sebuah pidato Drs. Mohammad Hatta di muka sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta, yang diajukan pada tanggal 2 September 1948, pidato ini kemudian berjudul Mendayung Antara Dua Karang. Pidato ini penulis dapatkan dari buku peringatan ulang tahun Bung Hatta ke - 90

---

<sup>21</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Jilid II Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 23.

yang berjudul “Mohammad Hatta: Beberapa pokok pikiran”, terbit tahun 1992 di Jakarta oleh UI Press, buku ini berisi karangan Bung Hatta selama hidup.

Pada tahun 1948, sewaktu Republik Indonesia dikepung oleh Belanda dan Ibukota bertempat di Yogyakarta maka Republik Indonesia dalam keadaan yang gelap. Suasana dalam negeri semakin kacau dengan tragedi Madiun, oposisi yang selalu mempegaruhi rakyat dengan menolak program kabinet, dan kondisi dunia internasional diantara dua pengaruh negara besar yang menggoyang cita - cita nasional. Sehingga dalam keadaan demikian Wakil Presiden Mohammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan mengucapkan keterangan yang berisi jawaban atas pandangan pihak oposisi dalam Badan Pekerja KNIP. Selain itu berisi pula penjelasan yang tegas mengenai sikap dan haluan politik nasional, baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang bersangkutan dengan luar negeri.<sup>22</sup>

Dalam program kerja Kabinet Hatta I tergambar usaha pemerintah kedalam dan keluar. Ke luar ialah berunding dengan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan Belanda dengan Republik Indonesia. Ke dalam ialah pertentangan politik dalam negeri yaitu dari kalangan Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengusulkan supaya Perundingan Renville dibatalkan. Kalangan ini menganjurkan supaya Republik Indonesia yang perjuangannya adalah anti imperialisme memilih tempat anti imperialis *front* yang dipimpin oleh Uni Soviet untuk menentang imperialism. Hal ini tentu akan melemahkan pendirian Republik Indonesia dalam menghadapi Perundingan Renville. Situasi ini

---

<sup>22</sup> Mohammad Hatta, *Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta: UI-Press, 1992, hlm. 21.

sebenarnya timbul sebagai akibat pergolakan politik internasional yang dikuasai oleh pertentangan Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>23</sup>

Pembahasan rumusan masalah yang terakhir yaitu strategi Kabinet Hatta I dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai pengakuan dunia internasional. Periode pemerintahan Kabinet Hatta I selama 19 bulan dirasa sangat singkat, ditambah dengan Agresi Militer Belanda II yang menjadikan kabinet dalam keadaan darurat dan berada dalam gerilya di Sumatra selama delapan bulan.

Adalah bukunya Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin dalam “*Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*” diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti tahun 1997. Dalam buku ini terjadi perubahan kebijakan politik Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia. Masa tahun - tahun pertama revolusi keterpihakan Amerika Serikat kepada Belanda terlihat nyata sekali, hal ini tidak bisa lepas dari usaha membendung arus komunisme di Eropa khususnya di Belanda<sup>24</sup>. Baru pada tahun 1948 dan 1949 Amerika Serikat mulai melirik Republik Indonesia setelah peristiwa Madiun 1948 di Republik Indonesia.<sup>25</sup> Begitupula bukunya Dr. Kuntowijoyo dalam “*Radikalisasi Petani, Esai - esai Sejarah: Diplomasi Amerika dan Revolusi Indonesia 1945 – 1949, Citra yang Tercabik*” yang diterbitkan oleh Bentang tahun 1993. Dalam bukunya Kuntowijoyo mengungkapkan diplomasi Amerika Serikat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 29 - 30.

<sup>24</sup> Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 34.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

di Indonesia tidak lepas dari persaingannya dengan Uni Soviet, walaupun dalam proses selanjutnya Republik Indonesia tidak terikat keduanya, tetapi tindakan Amerika Serikat ini berhasil menekan Belanda untuk melakukan penghentian perang dan melakukan perundingan dengan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Strategi untuk mendapatkan pengakuan didasarkan pada penanganan Kabinet Hatta I dalam menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan William D. Coplin bahwa kondisi dalam negeri dan luar negeri akan berpengaruh terhadap politik pemerintah dalam berhubungan dengan dunia internasional. Maka akan sangat tampak bahwa strategi dalam setiap penanganan masalah dan hasilnya akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada pencapaian pengakuan dunia internasional.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi dari adanya historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian (orisinalitas) sebuah karya ilmiah. Adanya penjelasan mengenai perbedaan penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tentunya sudah cukup untuk menunjukkan orisinalitas sebuah karya ilmiah<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Dr Kuntowijoyo, “Diplomasi Amerika dan Revolusi Indonesia 1945 - 1949: Citra Yang Tercabik” Dalam *Radikalisasi Petani: Esai – esai Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1993, hlm. 166.

<sup>27</sup> Daliman, *loc.cit.*

Penulisan skripsi ini diharapkan menuliskan sesuatu yang baru. Oleh karena itu penulis mencoba mencari karya tulis yang memiliki kemiripan dengan karya ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan sebuah karya skripsi yang memiliki relevansi dengan karya skripsi Dwi Wahyudi mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009. Judul skripsi tersebut adalah “Strategi Kabinet Hatta Menghadapi Front Demokrasi Rakyat Tahun 1948”. Karya tersebut berbeda dengan skripsi yang akan disusun, karena dalam skripsi Dwi Wahyudi ini inti pembahasannya adalah strategi Kabinet Hatta dalam menghadapi kondisi dalam negeri khususnya dalam menghadapi FDR sebagai pihak oposisi pemerintah sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya mencakup kebijakan - kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Kabinet Hatta I terkait hubungannya dengan kondisi dalam negeri dan dunia internasional untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.

Historiografi yang relevan yang kedua dari Isnaini mahasiswa sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 1998. Judul Skripsi tersebut adalah “Hubungan Diplomasi Indonesia - India Tahun 1946 - 1949: Langkah Politik Terselubung di Dunia Internasional”. Karya tersebut berbeda dengan skripsi yang akan disusun ini karena dalam karya Isnaini hanya mencakup hubungan Indonesia dan India sedangkan dalam skripsi yang akan disusun ini tidak terbatas pada satu negara saja. Dilihat dari waktunya karya Isnaeni berawal dari Kabinet Syahrir sampai mendapatkan pengakuan pada Kabinet Hatta II sedangkan skripsi yang akan disusun ini hanya pada Kabinet Hatta I.

## G. Metode Penelitian

Penulisan sejarah mempunyai metode sendiri dalam mengungkap suatu peristiwa masa lampau agar menghasilkan suatu karya sejarah yang logis dan kritis.<sup>28</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sejarah analitis kritis. Metode sejarah analitis kritis adalah cara penelitian dengan mempelajari fakta, peristiwa, dan peninggalan sejarah di masa lalu<sup>29</sup>.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah analitis kritis dengan menggunakan empat tahapan dengan penggunaan metode Louis Gottschalk yang terdiri sebagai berikut.

### a. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang berarti menemukan. Heuristik sendiri mengandung pengertian kegiatan sejarawan untuk mengumpulkan sumber, jejak-jejak sejarah yang diperlukan.<sup>30</sup> Sumber sejarah merupakan bahan - bahan yang dapat digunakan untuk mengungkapkan peristiwa - peristiwa yang telah terjadi. Sumber sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan topik yang akan ditulisi.

Berdasarkan wujudnya, sumber sejarah diklasifikasi menjadi tiga, yaitu sumber sejarah yang berupa benda (*remain*), sumber sejarah tertulis (*record*), dan

---

<sup>28</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 33 - 34.

<sup>29</sup> Waty Somanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 14.

<sup>30</sup> Sardiman A. M., *Memahami Sejarah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004, hlm. 101.

sumber lisan (*oral*)<sup>31</sup>. Adapun menurut bahannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis<sup>32</sup>.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian historis dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di berbagai perpustakaan, diantaranya: unit Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan sumber-sumber dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Verifikasi

Verifikasi yaitu suatu proses pengujian dan menganalisis secara kritis mengenai keotentikan sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Verifikasi ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber, atau kritik intern dan kredibilitas atau kebiasaan dipercaya atau kritik ekstern<sup>33</sup>. Kritik intern adalah adalah penilaian terhadap sumber sejarah dari isi sumber dokumen tersebut, jadi keaslian dokumen dianalisis berdasarkan isinya. Kritik ekstern adalah mengkaji sumber sejarah dari luar, mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan tulisan, jenis tinta, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autentisitasnya.

Verifikasi sangat diperlukan dalam penulisan sejarah, karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, semakin otentik penelitian sejarah yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 53.

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hlm . 90.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, verifikasi sangat diperlukan. Rentang waktu kajian dengan penulis terpaut jarak yang relatif jauh, sehingga hanya dimungkinkan menggunakan sumber pustaka dan sejarah lisan. Kritik sumber akan sangat diperlukan oleh penulis, terutama untuk menentukan otensitas pustaka tentang Kebijakan Kabinet Hatta I. Isi dalam pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi harus melalui kritik intern, sehingga diperoleh data otentik.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh dan ditetapkan kritik ekstern dan intern. Dengan terwujudnya fakta sejarah, belum bisa disebut sejarah dalam arti cerita tentang apa yang telah dialami manusia di waktu yang lampau. Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga antara fakta yang satu dengan fakta yang lain kelihatan sebagai suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kecocokan satu sama lainnya.

Studi pustaka yang dilakukan selama proses penulisan skripsi akan dimaknai secara utuh jika sumber yang diperoleh sudah dianggap cukup mewakili kebenaran, otensitas, kredibilitas, dan reliabilitas.

d. Penulisan

Penulisan sejarah adalah tingkat klimaks dari kegiatan penelitian sejarah. Fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diinterpretasikan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan cerita sejarah itu disajikan menjadi suatu karya sejarah. Penulisan karya sejarah mempunyai dua sifat, yaitu tulisan sejarah naratif

dan non naratif<sup>34</sup>. Sejarah naratif ingin membuat deskripsi tentang masa lampau dengan merekonstruksi apa yang terjadi serta diuraikan sebagai cerita menurut proses waktu. Sementara itu sejarah non naratif merupakan karya sejarah yang berpusat pada masalah. Sedangkan penulisan skripsi ini merupakan penulisan sejarah naratif.

## **H. Pendekatan Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan politik. Menurut Deliar Noer adalah segala usaha, tindakan atas suatu kegiatan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirjo pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Menurut Kuntowijoyo, perhatian ilmu politik adalah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekruitmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik, dan sebagainya.<sup>36</sup> Pendekatan politik dalam penulisan ini digunakan untuk menjelaskan peran negara dalam mempengaruhi massa, struktur kekuasaan, pertentangan kekuasaan, kepentingan, keputusan dan kebijakan. Terdapat kegiatan

---

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 54.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 194.

militer dalam pembahasan ini tetapi penulis cukup untuk menjelaskan politik dalam militer itu sehingga pendekatan militer tidak perlu digunakan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isi dari skripsi tersebut. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I. Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian, pendekatan penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II. Berisi kondisi politik sebelum Kabinet Hatta I, Mohammad Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri, dan pembentukan Kabinet Hatta I.
- Bab III. Berisi rencana program kerja dan tindakan Kabinet Hatta I dalam menghadapi kondisi dalam negeri dan dunia internasional.
- Bab IV. Berisi pembahasan tentang hasil program kerja dan strategi yang telah dilaksanakan Kabinet Hatta I dalam menjalankan pemerintahan hingga ke arah pengakuan kedaulatan.
- Bab V. Berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.